

Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat

¹Rengga Hadi Wijaya, ²Atih Rohaeti Dariah, ³Yuhka Sundaya
^{1,2,3}Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email:¹rengahw@gmail.com, ²ardariah.68@gmail.com, ³yuhkasun@gmail.com

Abstract. The economic development of a country or region is declared successful if an increase in per capita income is accompanied by a decrease in income inequality. West Java Province is one of the provinces that continues to increase per capita income during the period 2000 to 2015, but the increase in per capita income is not accompanied by a decrease in income inequality. The reversed U-curve theory Kuznets states that the relationship between increasing per capita income and income inequality will form an inverted U-curve pattern. The objective of the research is to estimate the economic model that can explain the influence of income per capita to income inequality in West Java Province. The method used is correlational analysis with econometric approach. The data used are time series data from 1975 until 2015 and model estimation using Ordinary Least Square (OLS) method with quadratic polynomial function. Not in accordance with Kuznets' reversed U-curve theory, the results of the study indicate that the effect of increased income per capita on income inequality in West Java Province shapes the U curve pattern. The phase of decreasing income inequality occurs when per capita income is below 12.329 million rupiah per year. An increase in income inequality occurs when per capita income is above 12.329 million rupiah per year.

JEL Codes : O150

Keywords: Income Per Capita, Inequality Income, Income Distribution

Abstrak. Pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah dinyatakan berhasil jika terjadinya peningkatan pendapatan per kapita yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terus mengalami peningkatan pendapatan per kapita selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, namun peningkatan pada pendapatan per kapita tersebut tidak diiringi oleh berkurangnya ketimpangan pendapatan. Teori kurva U-terbalik Kuznets menyatakan bahwa hubungan antara peningkatan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan akan membentuk pola kurva U-terbalik. Tujuan penelitian adalah mengestimasi model ekonomi yang mampu menjelaskan pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah korelasional analisis dengan pendekatan ekonometrik. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2015 dan estimasi model menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan fungsi polinomial kuadrat. Tidak sesuai dengan teori kurva U-terbalik Kuznets, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh peningkatan pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat membentuk pola kurva U. Fase penurunan ketimpangan pendapatan terjadi pada saat pendapatan per kapita dibawah 12.329 juta rupiah per tahun, sedangkan fase peningkatan ketimpangan pendapatan terjadi pada saat pendapatan per kapita diatas 12.329 juta rupiah per tahun.

JEL Codes : O150

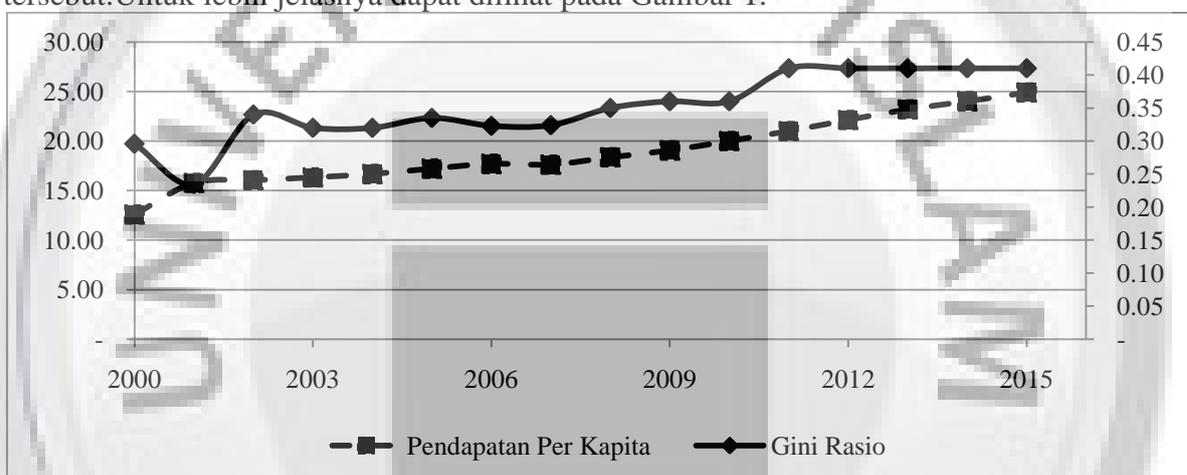
Kata kunci: Pendapatan Per Kapita, Ketimpangan Pendapatan, Distribusi Pendapatan

A. Pendahuluan

Pada dasarnya baik negara maju maupun negara berkembang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, dengan kata lain pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Kuncoro (2011) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah dinyatakan berhasil jika terjadinya peningkatan pendapatan per kapita yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara dan kinerja perekonomian secara keseluruhan, akan tetapi tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan per kapita saja melainkan harus memperhatikan proses pemerataan atau distribusi nilai tambah tertentu dalam kegiatan suatu wilayah.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang terus mengalami peningkatan pendapatan per kapita selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, dimana peningkatan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat selama periode tersebut yaitu sebesar 12.314 juta rupiah. Peningkatan pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Barat juga di ikuti oleh perubahan pada tingkat ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka *Gini Rasio* Provinsi Jawa Barat sebagai indikator tingkat ketimpangan yang mengalami peningkatan, penurunan, dan tetap selama periode tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Gambar 1. Perkembangan Pendapatan Per Kapita dan *Gini Rasio* Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 Sampai Dengan Tahun 2015

Gambar 1. menunjukkan bahwa ketika pendapatan per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun diikuti oleh perubahan ketimpangan pendapatan yang fluktuatif. Tahun 2001 pendapatan per kapita meningkat menjadi 15.78 juta rupiah yang diikuti oleh menurunnya angka *Gini Rasio* menjadi 0.24. Tahun 2002 pendapatan per kapita meningkat menjadi 16.03 juta rupiah yang diikuti oleh meningkatnya angka *Gini Rasio* menjadi 0.34. Tahun 2003 pendapatan per kapita meningkat menjadi 16.33 juta rupiah yang diikuti oleh menurunnya angka *Gini Rasio* menjadi 0.32. Tahun 2004 pendapatan per kapita meningkat menjadi 16.67 juta rupiah yang diikuti oleh tetapnya angka *Gini Rasio* sebesar 0.32. Tahun 2005 pendapatan per kapita meningkat menjadi 17.22 juta rupiah yang diikuti oleh meningkatnya angka *Gini Rasio* menjadi 0.34. Tahun 2006 pendapatan per kapita meningkat menjadi 17.69 juta rupiah yang diikuti oleh menurunnya angka *Gini Rasio* menjadi 0.32. Tahun 2007 pendapatan per kapita menurun menjadi 17.62 juta rupiah yang diikuti oleh tetapnya angka *Gini Rasio* sebesar 0.32. Tahun 2008 pendapatan per kapita meningkat menjadi 18.35 juta rupiah yang diikuti oleh meningkatnya angka *Gini Rasio* menjadi 0.35. Tahun 2009

pendapatan per kapita meningkat menjadi 19.06 juta rupiah yang diikuti oleh meningkatnya angka *Gini Rasio* menjadi 0.36. Tahun 2010 pendapatan per kapita meningkat menjadi 20 juta rupiah yang diikuti oleh tetapnya angka *Gini Rasio* sebesar 0.36. Tahun 2011 pendapatan per kapita meningkat menjadi 21.81 juta rupiah yang diikuti oleh meningkatnya angka *Gini Rasio* menjadi 0.41 dan secara berurutan peningkatan pendapatan per kapita pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 yaitu sebesar 22.76 juta rupiah, 23.74 juta rupiah, 24.76 juta rupiah, dan 25.70 juta rupiah diikuti oleh tetapnya angka *Gini Rasio* yaitu sebesar 0.41.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: (1) Mengestimasi model ekonomi yang menjelaskan pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat, (2) Mengetahui pada saat pendapatan per kapita berapa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat akan mengalami titik balik, (3) Mengetahui apakah hasil estimasi model ekonomi yang menjelaskan pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan teori para ahli.

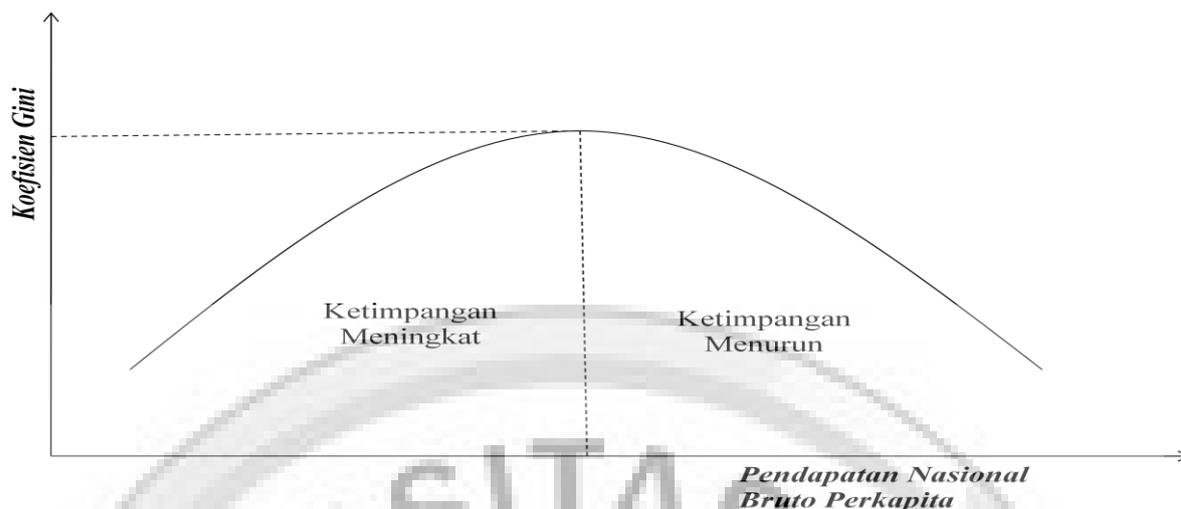
B. Landasan Teori

Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan meningkatnya pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat, antara lain (1) suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara berkelanjutan, (2) usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan (3) peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang (4) perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek perbaikan di bidang aturan main (*rule of the game*) baik aturan formal maupun informal dan organisasi (*players*) yang mengimplementasikan aturan main tersebut.

Pendapatan nasional merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian (negara) dalam satu periode tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran (Arsyad, 2010).

Menurut metode produksi pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor produktif. Cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penghitungan berganda (*double counting*). Di Indonesia sektor-sektor produktif terbagi ke dalam 17 sektor. Jumlah nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh 17 sektor tersebut selama satu tahun fiskal disebut dengan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross Nasional Product (GNP) yang dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).

Kuznet dalam analisisnya pada tahun 1955 yang berjudul “*Economic Growth And Income Inequality*” menemukan hubungan antara tingkat *Gross Nasional Income* (GNI) per kapita dan tingkat kesenjangan pendapatan yang membentuk kurva U terbalik. Kurva tersebut menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk, namun pada tahap berikutnya distribusi pendapatan tersebut akan membaik seiring dengan meningkatnya GNI per kapita. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik” (Arsyad, 2010).



Gambar 2. Kurva U-Terbalik Kuznet

Tahap awal pembangunan peranan sektor industri akan semakin meningkat, hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian (tradisional) ke sektor industri (modern) termasuk industri pengolahan dan jasa. Dalam transisi ekonomi ini produktivitas tenaga kerja pada sektor modern lebih tinggi dari pada produktivitas sektor tradisional sehingga pendapatan per kapita dan upah tenaga kerja pada sektor modern juga akan lebih tinggi. Hasilnya ketimpangan antara kedua sektor itu semakin meningkat.

Tahap akhir proses pembangunan ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan, yakni pada saat sektor industri modern sudah dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja dari sektor pertanian. Dalam transisi ekonomi ini produktivitas sektor tradisional akan membaik sehingga GNI atau pendapatan per kapita dan upah tenaga kerja pada sektor tradisional akan lebih tinggi. Hasilnya ketimpangan antara kedua sektor itu semakin menurun.

Todaro (2011) menyatakan bahwa pendapatan per kapita tidak selalu berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut tergantung kepada karakter pertumbuhannya seperti bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor mana yang mendapat prioritas, dan lembaga apa yang menyusun dan mengatur.

Garry Fields, sebagaimana dikutip dalam Todaro (2010) dengan menggunakan kurva Lorenz mengelompokkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menjadi tiga tipologi yaitu :

1. Tipologi pengayaan sektor tradisional

Keadaan yang menunjukkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang terbagi secara merata kepada semua pekerja sektor tradisional, tanpa ada atau sedikit pertumbuhan yang terjadi di sektor modern. Dalam tipologi ini pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, ketimpangan pendapatan yang relatif lebih rendah atau merata dan kemiskinan yang menurun.

2. Tipologi pengayaan sektor moder

Pertumbuhan ekonomi terbatas pada sekelompok orang dalam jumlah yang tetap di sektor modern, sedangkan jumlah tenaga kerja dan tingkat upah tetap konstan di sektor tradisional. Dalam tipologi ini pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, ketimpangan pendapatan yang relatif lebih tinggi atau kurang merata dan tidak ada perubahan dalam tingkat kemiskinan.

3. Tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern

Perekonomian dua sektor berkembang dengan memperluas ukuran sektor modernnya sambil mempertahankan tingkat upah konstan di dua sektor tersebut. Dalam tipologi ini pertumbuhan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, ketimpangan pendapatan yang mungkin membaik atau memburuk, dan kemiskinan yang menurun.

C. Pembahasan

Sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan pada penelitian, maka pada pembahasan ini akan menampilkan hasil estimasi model *Gini Rasio* yang menjelaskan pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dan pada pendapatan per kapita berapa ketimpangan pendapatan akan mengalami titik balik. Hasil estimasi tersebut menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan data *time series* untuk kurun waktu tahun 1975 sampai dengan tahun 2015. Estimasi model *Gini Rasio* di Provinsi Jawa Barat terdiri dari satu variabel terikat yaitu *Gini Rasio* dan dua variabel bebas yaitu pendapatan per kapita (PP), dan pendapatan per kapita kuadrat (PP²). Estimasi model *Gini Rasio* ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Estimasi Model *Gini Rasio*

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	0.418909	0.020499	20.43538	0.0000
PP	-0.018083	0.003138	-5.762092	0.0000
PP ²	0.000752	0.000109	6.911600	0.0000
R-squared				0.658560
F-statistic				36.64674
Prob(F-statistic)				0.000000

Sumber : Hasil olah data, (EViews)

Tabel 3. menyatakan bahwa pendapatan per kapita dan pendapatan per kapita kuadrat berpengaruh dan dapat menjelaskan secara kuat perubahan pada ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas t-statistik masing-masing yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 ($\alpha=5$ persen), dimana variabel pendapatan per kapita memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0000 dan pendapatan per kapita kuadrat memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0000, Sehingga H_0 berada di daerah penolakan. Secara matematis untuk hasil estimasi model ini dapat disajikan sebagai berikut :

$$GR_{it} = 0.418909 - 0.018083PP_t + 0.000752PP_t^2 \quad (3.1)$$

Adapun arti dari nilai koefisien dalam estimasi model *Gini Rasio* (3.1) adalah setiap ada pertambahan 1 juta rupiah pada pendapatan per kapita per tahun akan menurunkan angka *Gini Rasio* sebesar 0.018083, sedangkan setiap ada pertambahan 1 juta rupiah pada pendapatan per kapita kuadrat per tahun akan meningkatkan angka *Gini Rasio* sebesar 0.000752, dengan asumsi *ceteris paribus*.

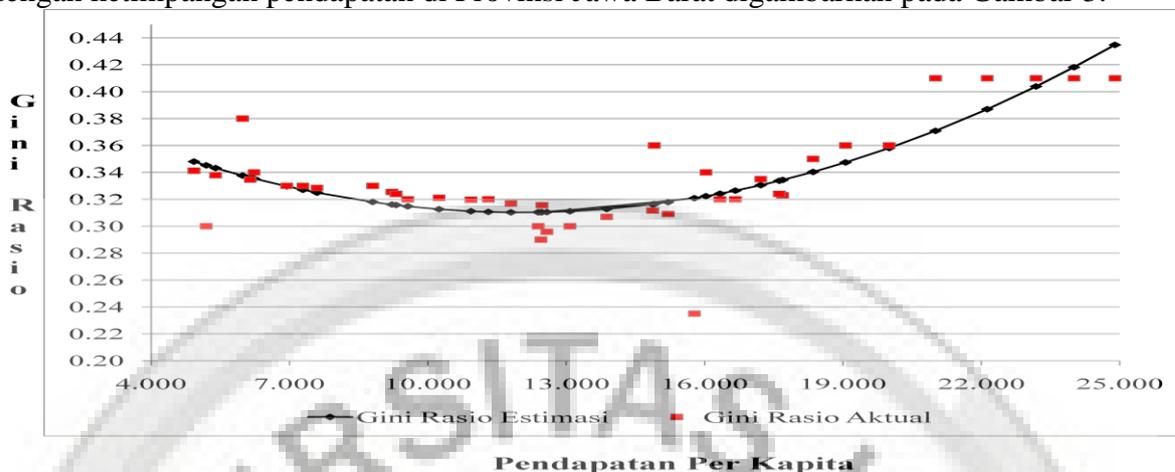
Menggunakan turunan dari hasil estimasi model persamaan 3.1 maka titik balik pada kurva dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\partial GR}{\partial X1} = -0.018083 + 0.001504 X1 = 0$$

$$X1_{max} = 12.023$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa titik balik pada kurva hubungan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat terjadi

pada saat pendapatan per kapita sebesar 12.023 juta rupiah atau sebesar 924 dollar Amerika Serikat per tahun. Untuk lebih jelasnya hubungan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat digambarkan pada Gambar 3.



Sumber : Hasil olah data, Excel

Gambar 3. Hubungan Pendapatan Per Kapita dengan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat

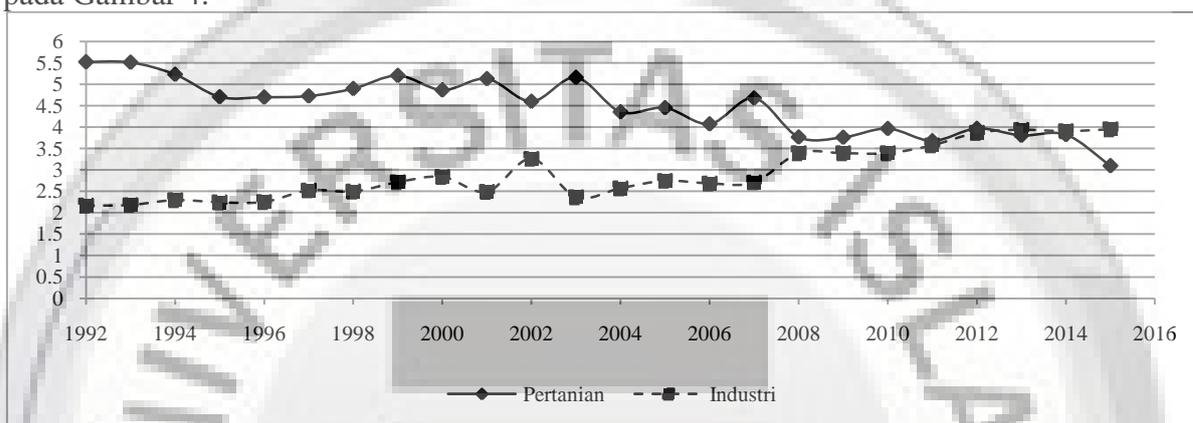
Gambar 3. menggambarkan bahwa berdasarkan hasil estimasi model *Gini Rasio* hubungan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 1975 sampai dengan tahun 2015 akan membentuk pola kurva U. Perubahan pada ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dapat dibagi kedalam dua fase yaitu fase penurunan ketimpangan pendapatan dan fase peningkatan ketimpangan pendapatan. Temuan ini tidak sesuai dengan teori Kuznets yang menyatakan bahwa hubungan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan akan membentuk pola kurva U-terbalik, dimana pada fase awal akan terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dan pada fase selanjutnya akan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan.

Fase penurunan ketimpangan pendapatan terjadi pada periode tahun 1975 sampai dengan tahun 1991. Pada fase ini perekonomian di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh sektor non-industri. Dominasi sektor non-industri terlihat dari kontribusi sektor pertanian dan sektor perdagangan terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat. Sektor pertanian mendominasi perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 1975 samapai dengan tahun 1985 dengan rata-rata kontribusi sebesar 28.18 persen per tahun dari total PDRB selama periode tersebut, sedangkan sektor perdagangan mendominasi perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 dengan rata-rata kontribusi sebesar 20.60 persen per tahun dari total PDRB selama periode tersebut. Pada fase ini pendapatan per kapita meningkat dari 4.930 menjadi 11.801 juta rupiah per tahun dan diikuti oleh menurunnya angka *Gini Rasio* dari 0.35 menjadi 0.31.

Fase peningkatan ketimpangan pendapatan terjadi pada periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2015, kecuali pada tahun 1998 ketika terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Pada fase ini terjadi perubahan struktur ekonomi dari yang tadinya didominasi oleh sektor pertanian (tradisional) menjadi sektor industri pengolahan (modern). Perubahan struktur ekonomi terlihat dari sudah mendominasinya kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 1992. Kontribusi sektor industri pengolahan

cenderung mengalami peningkatan dari tahun 1992 ke tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga mencapai puncaknya pada tahun 2008 yaitu sebesar 46.10 persen dari total PDRB. Pada fase ini pendapatan per kapita meningkat dari 12.476 menjadi 24.895 juta rupiah per tahun dan diikuti oleh meningkatnya angka *Gini Rasio* dari 0.31 menjadi 0.43.

Peningkatan pendapatan per kapita diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan karena setelah perekonomian di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor tersebut tidak mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja dari sektor sebelumnya yaitu sektor pertanian secara cepat. Untuk lebih jelasnya jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri pengolahan disajikan pada Gambar 4.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 4. Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan Tahun 1975-2015

Gambar 4 menggambarkan bahwa setelah perekonomian di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan baru pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan mampu melebihi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2015 yaitu dari sebanyak 5.52 juta orang pada tahun 1992 menjadi 3.10 juta orang pada tahun 2015 atau berkurang sebanyak 2.43 juta orang selama periode tersebut. Sedangkan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2015 yaitu dari sebanyak 2.16 juta orang pada tahun 1992 menjadi 3.95 juta jiwa pada tahun 2015 atau bertambah sebanyak 1.78 juta orang selama periode tersebut.

Hidayat (2011) menyatakan bahwa faktor tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap total output industri pengolahan. Faktor yang mempengaruhi output industri pengolahan adalah penanaman modal asing dan modal dalam negeri. Hal ini menggambarkan bahwa hasil dari total output pada industri pengolahan hanya dapat dinikmati oleh para penanam modal saja sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan akan semakin meningkat pada saat ada penambahan output atau pendapatan total pada sektor industri pengolahan.

Gallup (2012) menyatakan bahwa, tidak ada bukti kuat dalam teori kurva U-terbalik Kuznets yang menggambarkan perubahan khas pada ketimpangan pendapatan saat terjadinya pertumbuhan pendapatan. Hal tersebut didasarkan pada pertanyaan data apa yang dipakai Kuznets dalam tulisannya pada tahun 1955. Menurutnya data panel

lintas negara mengenai ketimpangan pendapatan baru tersedia pada tahun 1990an. Kuznets sendiri mengakui bahwa dalam tulisannya mungkin hanya 5 persen yang merupakan informasi empiris dan 95 persen sisanya merupakan hasil spekulasi.

Gallup (2012) menyatakan bahwa, hubungan angka *Gini Rasio* dan pendapatan akan membentuk kurva U, dimana negara-negara dengan Gross Domestic Produk (GDP) per kapita dibawah 15 ribu dollar Amerika Serikat diperkirakan angka *Gini Rasio* nya akan menurun sedangkan negara-negara dengan GDP per kapita diatas 15 ribu dollar Amerika Serikat diperkirakan angka *Gini Rasio* nya akan meningkat.

Hasil perhitungan tersebut harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mencegah ketimpangan pendapatan yang dilihat dari angka *Gini Rasio* semakin meningkat ketika pendapatan per kapita meningkat. Ketimpangan pendapatan dapat dikurangi secara bertahap melalui kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita oleh orang miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah dalam jangka waktu yang panjang. Todaro (2000) menyatakan bahwa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer” dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya.

D. Kesimpulan

Hasil estimasi model *Gini Rasio* menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas F-statistik yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 (5 persen), dimana nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.0000.

Pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat bersifat tidak linier, dimana peningkatan pendapatan per kapita sebelum PDRB per kapita sebesar 12.023 juta per tahun akan menyebabkan penurunan pada ketimpangan pendapatan sedangkan peningkatan pendapatan per kapita setelah pendapatan per kapita sebesar 12.023 juta per tahun akan menyebabkan peningkatan pada ketimpangan pendapatan.

Hubungan pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan teori kurva U-terbalik Kuznets, namun sesuai dengan pernyataan Garry Fields, dimana jika pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor tradisional maka ketimpangan akan relatif lebih rendah dan jika pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor modern maka ketimpangan akan relatif lebih tinggi.

E. Saran

Pemerintah harus mendorong industri padat karya yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, dengan berkurangan pengangguran pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga ketimpangan pendapatan dapat berkurang secara bertahap.

Menodorong produktivitas sektor pertanian dengan cara melakukan pelatihan, penelitian, penggunaan teknologi tepat guna, dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya sehingga pendapatan para petani dapat meningkat dan ketimpangan pendapatan dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan dapat berkurang secara bertahap.

Mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat marginal, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, 2015, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2016, *Jawa Barat Dalam Angka 1975-2016*, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Bandung.
- Case dan Fair, 2007, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.
- Gallup, 2012, *The Global Convergence Of Income Distribution*, Portland State University, Portland.
- Gallup, 2012, *Is There a Kuznets Curve*, Portland State University, Portland.
- Haviz, Julia, dan Haryatiningsih, 2015, *Modul Laboratorium Ekonometrika*, Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Kuznets, 1995, *Economic Growth And Income Inequality*, The American Economic Review, Amerika.
- Todaro and Smith, 2011, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas, Erlangga, Jakarta.
- Sukirno, 2006, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Sumodiningrat, 2010, *Pengantar Ekonometrika*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.